



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli 1997 telah mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi rakyat Indonesia. Dampak lebih jauh adalah semakin banyak jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah. Bank Dunia (1998:2) menemukan isu strategis dalam bidang pendidikan yang akan dihadapi Indonesia berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi, yaitu anjloknya angka partisipasi sekolah terutama anak yang berasal dari keluarga miskin dan merosotnya kualitas sekolah.

Perhatian utama pemerintah memang sudah seharusnya tetap ditekankan pada pendidikan dasar. Mengingat, sebelum terjadi krisis saja pemerintah tidak punya anggaran yang cukup untuk menyelesaikan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya pemerintah untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar, selain dengan memberikan beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO), juga dengan pembangunan unit gedung baru SMP dan rehabilitasi gedung-gedung SD yang rusak.

Kebutuhan pembangunan gedung atau ruangan baru dan rehabilitasi gedung yang rusak bagi sebagian sekolah merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi demi terselenggaranya PBM yang baik. Bahkan kebutuhan akan unit gedung baru atau rehabilitasi gedung yang rusak banyak dirasakan oleh SD dan SMP. Banyak siswa SD yang terpaksa belajar di rumah penduduk atau

kantor kepala desa karena gedung sekolah mereka rusak, dan terpaksa SMP membuka sistem *double shift* yang melayani siswa pagi-siang.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bab IX pasal 62 ayat (1) bahwa: “Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal”. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

The School Improvements Grants Program (SIGP) bagian dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pendidikan merupakan program tanggap krisis yang didanai dari hibah Pemerintah Belanda terutama untuk membantu sekolah-sekolah yang berada di daerah miskin.. Program ini menyediakan dana bantuan untuk SD, MI, SDLB, SLTP, MTs, dan SLTPLB. Dana bantuan disediakan dalam jumlah yang cukup, untuk memastikan terjadi perubahan yang nyata dalam kualitas proses belajar mengajar di sekolah yang mendapatkan bantuan melalui perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan tentang model manajemen pembiayaan pendidikan yang difokuskan pada kebijakan SIGP di Kabupaten Garut. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji hal tersebut, karena pada dana bantuan SIGP ini terdapat sistem penyaluran dana yang sangat inovatif, yaitu dana yang disalurkan pemerintah langsung diterima sekolah (*block grant*), pengelolaan dana bantuan SIGP banyak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga sangat berkaitan erat dengan MBS, penggunaan dana tidak hanya satu jenis komponen kegiatan sekolah, akan tetapi sekolah diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan komponen yang akan didanai berdasarkan kebutuhan, dan banyak lagi konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan pendidikan yang bisa dikaji sehingga menghasilkan konsep-konsep kebijakan pembiayaan pendidikan yang sangat bermanfaat.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang hendak diteliti yaitu implementasi kebijakan tentang model manajemen pembiayaan pendidikan yang difokuskan pada studi kebijakan SIGP di Kabupaten Garut, jelas masalah tersebut berada pada wilayah bidang studi administrasi pendidikan.

Secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat masalah utama yang akan diteliti, yaitu: (1) latarbelakang diberlakukan kebijakan SIGP; (2) manajemen Pembiayaan SIGP yang mencakup perencanaan dana, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggungjawaban dana; (3) efektivitas kebijakan SIGP; (4) masalah serta cara mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan SIGP. Secara garis besar permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Permasalahan pertama berkaitan dengan latarbelakang diberlakukan kebijakan SIGP, bahwa SIGP dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu seiring dengan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis multidimensional, termasuk perubahan sistem Pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Permasalahan kedua berkaitan manajemen pembiayaan SIGP, bahwa dalam perencanaan dana bantuan SIGP mencakup tentang pola perencanaan, kriteria penentuan pemilihan sekolah terpilih, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan dana, dan mekanisme penyaluran dan pengambilan dana. Sementara dalam penggunaan dana bantuan SIGP mencakup tentang sistem pengaturan berdasarkan arah kebijakan, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip guna menjamin agar dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun dalam pengawasan dan pertanggungjawabab mencakup aspek-aspek yang yang diawasi, hasil pengawasan, tindak lanjut pengawasan, prosedur pertanggungjawaban, pihak-pihak yang bertanggung jawab, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, dan pendelagasian wewenang dan tanggung jawab.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan efektifitas kebijakan SIGP, bahwa tingkat kebermaknaan kebijakan SIGP perlu diukur dengan melihat tingkat efektifitas, sehingga sistem dan prosedur yang dipergunakan dalam implemenyasi kebijakan SIGP dapat menjadi reperensi untuk implementasi kebijakan lain.

Permasalahan keempat berkaitan dengan masalah dan solusi dalam implementasi kebijakan SIGP, bahwa dalam implementasi suatu kebijakan lajim ditemukan berbagai masalah, masalah tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa adanya penyelesaian sehingga perlu dicari dan dirumuskan cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : (1) latarbelakang diberlakukan kebijakan SIGP; (2) manajemen Pembiayaan SIGP yang mencakup perencanaan dana, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggungjawaban dana; (3) efektivitas kebijakan SIGP; (4) masalah serta cara mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan SIGP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh nilai praktis dan nilai akademis. Nilai praktis penelitian ini berhubungan dengan sumbangan pemikiran dalam cara-cara upaya perbaikan implementasi kebijakan dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan ditinjau dari aspek akademis (teoritis) penelitian ini sangat berkepentingan untuk mengkaji dan menguji konsep kebijakan dan pembiayaan pendidikan.

E. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat pertanyaan pokok penelitian yang ingin dicari jawabannya, yaitu:

1. Apakah yang menjadi latarbelakang diberlakukan kebijakan SIGP;?
2. Bagaimana manajemen pembiayaan SIGP yang mencakup perencanaan dana, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggungjawaban dana?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan SIGP?
4. Apakah masalah yang timbul dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan SIGP ?

F. Asumsi

1. Supaya terwujud efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan memerlukan kebijakan tertentu yang bertumpu pada reorganisasi sekolah dari sentralistik menjadi pola desentralistik yang memberikan otonomi lebih memadai sebagai jaminan kelancaran pengelolaan sekolah.
2. Di era otonomi daerah, posisi dan fungsi pembiayaan ini begitu penting dalam pengelolaan pendidikan, sehingga diperlukan satu sistem pembiayaan dalam otonomi daerah. Sistem ini mencakup keseluruhan unsur yaitu: policy dan prioritas pendidikan, jumlah populasi yang harus menerima pendidikan, sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan, model alokasi dan distribusi, mekanisme penggunaan termasuk pertanggungjawaban dana, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan proses pengawasan.

G. Paradigma Penelitian

Kebijakan pendidikan merupakan respon terhadap masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan yang ditugaskan pada Dinas Pendidikan kabupaten sebagai unit pelaksana teknis. Sebagai unit pelaksana teknis yang ditugaskan melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan, maka strateginya Dinas Pendidikan kabupaten selian membuat kebijakan lokal juga berusaha mengimplementasikan berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Rumusan strategi tersebut merupakan landasan utama dalam operasional Dinas Pendidikan kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan di tingkat lokal. Produk pembinaan dan pengembangan pendidikan salah satunya kemampuan melakukan manajemen pembiayaan pendidikan

Adapun berbagai komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan dan manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) latarbelakang kebijakan; (2) perencanaan dana; (3) penggunaan dana; (4) pengawasan dan pertanggungjawaban dana; (5) efektifitas kebijakan, (6) masalah dan solusinya dalam implementasi kebijakan pendidikan.

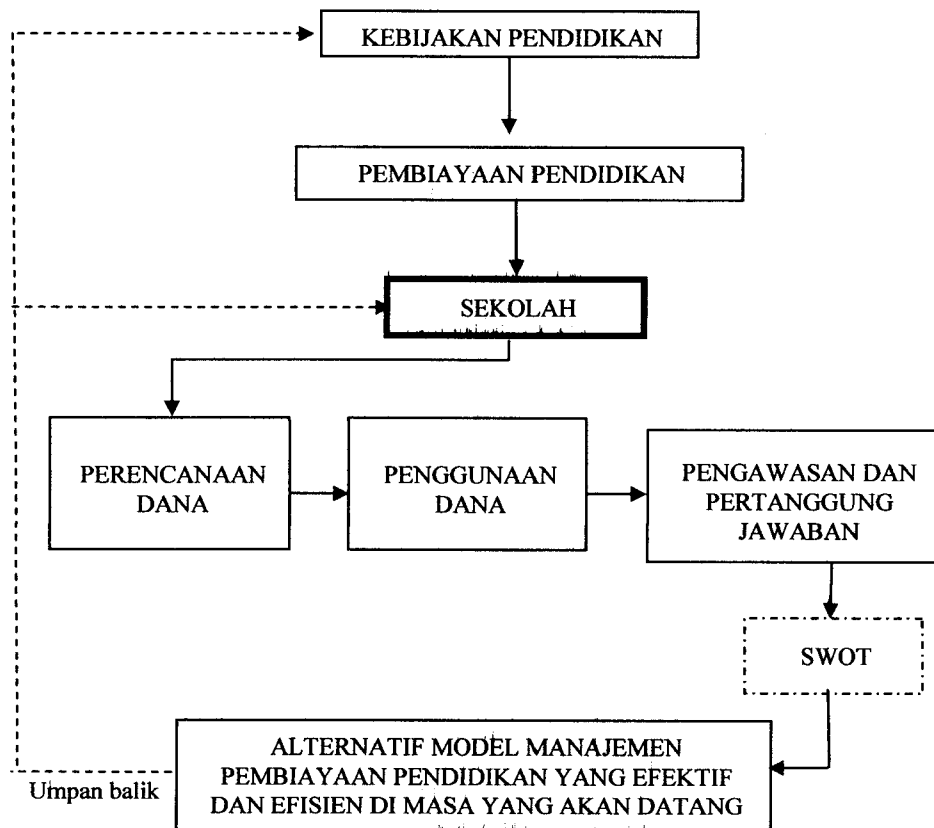
Kebijakan pendidikan yang efektif memberikan dampak terhadap percepatan peningkatan mutu sekolah. Dirhana perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan informasi. Implikasi terhadap manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mengoptimalkan dana dalam meningkatkan mutu sekolah. Suatu harapan besar dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan adalah memenuhi kepuasan dalam proses dan hasil serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai nilai sosial dan ekonomi. Dengan demikian sekolah yang mampu meningkatkan mutu pendidikannya akan memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat di masa yang akan datang.

Menyadari pentingnya melakukan analisis sistem terhadap implementasi kebijakan dalam manajemen pembiayaan pendidikan maka analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) dapat dijadikan masukan untuk mengidentifikasi kondisi objektif tentang efektifitas dan efisiensi penggunaan dana. Implikasinya hasil dari evaluasi dan analisis sistem dalam kebijakan pendidikan



akan berfungsi sebagai umpan balik bagi sekolah dan lembaga penyelenggara pendidikan ke arah perumusan strategi pembinaan dan pengembangan mutu sekolah.

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan paradigma atau kerangka pikir penelitian seperti pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1

Paradigma Penelitian

H. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri atas:

Bab I pendahuluan berisi : (1) latar belakang; (2) identifikasi masalah; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; (5) pertanyaan penelitian; (6) asumsi; (7) paradigma penelitian; dan (8) sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II landasan teoritis berisi uraian umum tentang kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan yang diuraikan lebih rinci tentang: (1) kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam konteks administrasi pendidikan; (2) kebijakan pendidikan; (3) manajemen pembiayaan pendidikan; (4) studi-studi terdahulu yang relevan; dan (5) kesimpulan landasan teoritis.

Bab III metode penelitian berisi: (1) pengembangan alat pengumpulan data, (2) penentuan ukuran sampel (subjek studi), (3) pengumpulan data, dan (5) prosedur dan teknik pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan berisi: (1) temuan-temuan penelitian yang menyajikan hasil pengolahan atau analisis data berdasarkan temuan atas fenomena yang diperoleh di lapangan, sedangkan (2) pembahasan yang berisi diskusi atas temuan-temuan hasil penelitian.

Bab V kesimpulan dan implikasi berisi: (1) kesimpulan yang menyajikan penafsiran/pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya; dan (2) implikasi atau rekomendasi berupa usulan/saran-saran kepada para pembuat kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kepada peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian selanjutnya.